



**MEKANISME PELAKSANAAN PERHITUNGAN DAN PENETAPAN INSENTIF
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KARYAWAN TETAP DI MASA
PANDEMI COVID - 19 PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PENGKREDITAN
RAKYAT ROKAN HULU (PD.BPR ROKAN HULU)**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar ahli madya (A,Md) pada
program studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

OLEH :

FADHIL ADITYA
01870613855



**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : FADHIL ADITYA
NIM : 01870613855
FAKULTAS : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
JURUSAN : D3 Administrasi Perpajakan
JUDUL : Mekanisme Pelaksanaan Perhitungan Dan Penetapan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu (PD.BPR Rokan Hulu)

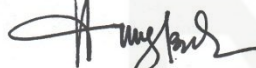
Disetujui Oleh :

PEMBIMBING


Sahwitri Triandani, SE.M.Si
NIP.19820806 200604 2 002

MENGETAHUI

Dekan


Dr. Hj. Mahyarni, SE., M.M
NIP. 1970826 199903 2 001

Ketua Program Studi


Sahwitri Triandani, SE.M.Si
NIP.19820806 200604 2 002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : FADHIL ADITYA
NIM : 01870613855
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
PROGRAM STUDI : DIPLOMA 3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
JUDUL : MEKANISME PELAKSANAAN PERHITUNGAN
DAN PENETAPAN INSENTIF PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KARYAWAN
TETAP DI MASA PANDEMI COVID - 19 PADA
PERUSAHAAN DAERAH BANK PENGKREDITAN
RAKYAT (PD.BPR ROKAN HULU)
TANGGAL UJIAN : 13 JULI 2021

Disetujui Oleh :
PANITIA PENGUJI
KETUA


Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP.19790101 200710 1 003

MENGETAHUI

PENGUJI I


Dr. Khairil Henry, SE, M.Si, AK
NIP.19751129 200801 1 009

PENGUJI II


Afrizal, S.Sos, M.Si
NIP.19690419 200701 1 025

UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

MEKANISME PELAKSANAAN PERHITUNGAN DAN PENETAPAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KARYAWAN TETAP DI MASA PANDEMI COVID - 19 PADA PD.BPR ROKAN HULU

OLEH : FADHIL ADITYA

Penelitian ini dilakukan di PD.BPR Rokan hulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Mekanisme perhitungan dan penetapan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan tetap dan apa saja kendala yang terjadi pada saat perhitungan dan penetapan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 di PD.BPR Rokan Hulu. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer yang di peroleh melalui wawancara di PD.BPR Rokan Hulu.hasil penelitian menunjukan bahwa 1) mekanisme perhitungan dan penetapan Insentif pajak penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah perbedaannya hanya pada akhir di perhitungannya dan penetapannya saja, pebedaan perhitungannya yang seharusnya dibayar atau di setorkan ke Negara tidak di setorkan melainkan di bayarkan kembali kepada wajib pajak, penetapan insentif pajak penghasilan orang pribadi yaitu yang berpenghasilan tidak lebih dari Rp.200.000.000 atau dalam satu bulanya tidak lebih dari Rp.15.000.0000. 2) mekanisme perhitungan dan penetapan pajak penghasilan terkendala karena kurang stabilnya koneksi jaringan internet dan kurangnya pengetahuan tentang peraturan terbaru tentang insentif pajak penghasilan. 3) pemberian insentif pajak penghasilan pasal 21 dapat menguramgi penderitaan wajib pajak yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung dengan adanya wabah pandemi covid-19.

Kata Kunci: Mekanisme, Perhitungan dan Penetapan Insentif Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT senantiasa kita ucapkan, atas limpahan berkat, rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul”**Mekanisme Pelaksanaan Perhitungan Dan Penetapan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap Di Masa Pandemi Covid-19 Pada PD.BPR Rokan Hulu ”** yang merupakan salah satu kewajiban untuk bisa lulus dan mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) dari studi program D3 Administrasi Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang setia mengorbankan jiwa raga untuk tegaknya syi’ar Islam, yang berpengaruh maanfaatnya hingga kini masih terasa.

Ucapan terima kasih tak lupa penulis ucapkan untuk kedua orang tua tercinta ayahanda **Sriyanto,S.sos** dan Ibunda **Sudarmi**. Terima kasih yang sebesar besarnya untuk kedua orang tua yang telah mendidik, merawat penulis dari kecil sampai saat ini, dan untuk perjuangan dan juga do’a dari orang tua, semoga Ayah dan Ibunda penulis dirahmati oleh Allah SWT, amin. Tidak lupa juga penulis hanturkan banyak terimakasih kepada keluarga besar, kakek, nenek, Abang, om, tante, sepupu, kerabat serta sahabat dekat penulis lainnya yang selalu memotivasi penulis agar segera menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan cepat.

Tugas Akhir ini penulis banyak mendapat saran, dorongan, bimbingan, serta keterangan-keterangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan segala hormat dan kerendahan hati perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M,Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak dan Ibu Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si Dr.Mahmuzar, M.Hum, Dr. Hj.Julina, SE, M. Si, selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilm Sosial Universitas Sultan Syarif Kasim Riau
4. Ibu Sahwitri Triandani, SE, M,Si seaku Ketua Prodi D3 Administrasi Perpajakan dan Pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukkan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan, membimbing, dan menyempurnakan Tugas Terakhir ini.
5. Ibu Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si selaku Sekretaris Prodi D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Alchudri, SE., CA., MM.,CPA selaku Penasehat Akademik selama kurang lebih 3 tahun, terima kasih atas nasehat dan bimbingan yang telah diberikan selama ini.
7. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial tanpa terkecuali. Terimakasih atass bantuan yang tiaa hentinya bagi penulis selama ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8. Terima Kasih Kepada Direktur Utama PD.BPR Rokan Hulu Bapak Anggi Firmansyah, ST, MM beserta seluruh pegawai Khususnya bagian seksi umum, akuntansi dan SDM.
9. Terima kasih kepada sahabatku Arifal Ikhsan, Muhammmad Raihan, Muhammad Syuhada, Muhammad Nur Effendi, Riggih Alfizohri, Erwin Nugroho, Muhammad Pahad, Sherly leonita dan semua sahabatku yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih telah membantu dan memberikan memotivasi
10. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Jurusan D3 Adminisrasi Perpajakan
Terima kasih telah memberikan pengalaman, kekompakan, kebersamaan dan cerita tersendiri kurang lebih 3 tahun ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir Ini penulis mengucapkan Terima Kasih

Segala bantuan yang telah diberikan hendaknya menjadi amal sholeh dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Kepada Allah SWT jugalah penulis berserah diri, kiranya Allah SWT selalui meridhaise segala yang kita lakukan Amin....

Pekanbaru, Juni 2021

Penulis,

Fadhil Aditya

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penulisan	8
1.4 Menfaat Penulisan	9
1.5 Metode Penelitian	10
1.6 Sistematika Penelitian	11
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	13
2.1 Sejarah Umum PD. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) ROKAN HULU	13
2.2 Visi & Misi PD.BPR ROKAN HULU	14
2.3 Struktur Organisasi PD.Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Rokan Hulu	15
2.4 Uraian Tugas PD. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Rokan Hulu	18
2.5 Sumber Daya Manusia PD.Bank Pengkreditan Rakyat Rokan Hulu	23
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	24
3.1 Tinjauan Teori	24
3.2 Tinjauan Praktek	44

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Insentif Pajak Tahun 2009,2016,2018	6
Tabel 2.1 Daftar Karyawan PD.BPR Rokan Hulu	23
Tabel 2.2 Jumlah Karyawan Berdasarkan Pendidikan	23
Tabel 3.1 Dasar Tarif PTKP	39
Tabel 3.2 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21	40
Tabel 3.3 Daftar Penghasilan Karyawan PD.BPR Rokan Hulu	45
Tabel 3.4 Perbandingan Perusahaan dengan Undang – Undang	53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar : II.1 Struktur Organisasi PD. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Rokan Hulu	17
Gambar 3.1 Laporan realisasi PPh 21 DTP	49
Gambar 3.2 Bukti Potong Form 1721 A1	50
Gambar 3.3 Surat Pemberitahuan	51



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang dengan giat melakukan pembangunan di segala sektor. Pembangunan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, untuk kelancaran pelaksanaan diperlukan dana yang relative besar sebagai pendapatan negara. Sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional salah satunya adalah pajak. Pajak penghasilan memiliki potensi besar bagi pemerintah dalam sektor perpajakan.

Pajak Penghasilam (PPh) pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang – undang pajak penghasilan (Mardiasmo, 2018). Pajak Penghasilan pasal 21 dipotong oleh pemotong pajak, yang dimaksud dengan pemotong Pajak adalah pemberi kerja, bendaharaan pemerintah, badan, perusahaan dan penyelenggara kegiatan.

Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Negara, baik di bidang kenegaraan maupun di bidang sosial dan ekonomi. Sistem pemungutan Pajak merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan Pajak suatu Negara. Secara umum, terdapat tiga sistem pemungutan Pajak, yaitu *official assessment system* (1967), *withholding system* (1968-1983), dan *self assessment system* (1984). Seiring berjalannya waktu, sejak adanya reformasi Indonesia mulai menerapkan *self assessment system*. Dalam sistem ini, Wajib Pajak dituntut untuk berperan aktif, mulai dari mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak terutang, dan menyetor kewajibannya. Setiap Wajib Pajak yang terdaftar tentu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dianggap sudah mengerti dan memahami mengenai peraturan perpajakan yang berlaku.

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah merupakan sumber terpenting dari penerimaan Negara. Penerimaan Negara dari pajak dapat dijadikan sebagai indikator atas peran serta masyarakat (sebagai subjek pajak) dalam kontribusinya melakukan kewajiban perpajakan, karena pembayaran pajak yang dilakukan akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk tidak langsung dan berupa pengeluaran rutin dan pembangunan yang berguna bagi rakyat.

Dalam mendukung pembangunan nasional Pajak dapat dilaksanakan dengan prinsip kemandirian. Sumber penerimaan pajak harus ditingkatkan. Dalam pemungutan pajak dari PPh pasal 21 masih banyak masalah yang dihadapi salah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satunya, kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Seperti jenis pajak lain pada umumnya, PPh 21 juga berfungsi menstabilkan ekonomi negara. Pegawai maupun penerima penghasilan lain yang membayarkan pajak penghasilannya secara rutin telah berperan langsung dalam menghambat laju inflasi di Indonesia. Selain itu, juga berfungsi meningkatkan perlindungan dan menyeimbangkan produksi dalam negeri atau PPN.

Perusahaan Daerah Bank Pengkreditan Rakyat Rokan Hulu atau di singkat dengan PD.BPR Rokan Hulu, merupakan milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Rokan Hulu yang berkedudukan di Kabupaten Rokan Hulu yang beralamat di JL. Tuanku Tambusai Komplek Pasar Modern, Pasir Pengaraian Rokan Hulu. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 25 Juli 2007, yang bergerak dalam bidang perbankan.

The COVID-19 pandemi, juga dikenal sebagai pandemi *coronavirus*, adalah terus pandemi global dari penyakit *coronavirus* 2019 (*COVID-19*) yang disebabkan oleh akut sindrom pernafasan *coronavirus* 2 (*SARS-CoV-2*). Ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, Cina. *The World Health Organization* menyatakan wabah sebuah Kesehatan Darurat Masyarakat Peduli Internasional pada 20 Januari 2020, dan kemudian pandemi pada 11 Maret 2020. Pada 3 April 2021, lebih dari 130 juta kasus telah dikonfirmasi, dengan lebih dari 2,84 juta kematian dikaitkan dengan COVID-19, menjadikannya salah satu pandemi paling mematikan dalam sejarah.

Pandemi telah mengakibatkan gangguan sosial dan ekonomi global yang signifikan, termasuk resesi global terbesar sejak Depresi Hebat di awal abad ke-



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

20. Ini menyebabkan kekurangan pasokan yang meluas diperburuk oleh pembelian panik, gangguan pertanian dan kekurangan makanan, dan penurunan emisi polutan dan gas rumah kaca. Banyak institusi pendidikan dan tempat umum telah ditutup sebagian atau seluruhnya, dan banyak acara telah dibatalkan atau ditunda. Informasi yang salah telah beredar melalui media sosial dan media massa. Pandemi telah mengangkat masalah diskriminasi ras dan geografis, keadilan kesehatan, dan keseimbangan antara keharusan kesehatan masyarakat dan hak individu.

Di era yang sedang dilanda wabah Virus Covid-19 pemerintah melakukan pemberian insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang di tanggung oleh pemerintah guna meningkat gejolak ekonomi akibat dari wabah virus Covid -19 ini. Perusahaan yang bisa mengajukan insentif Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 ditanggung Pemerintah untuk karyawan atau pegawainya sesuai Pasal 2 ayat (3) PMK No. 86/2020.

Tahun 2021 masih menjadi tahun yang sulit sebab Covid-19 masih menghantui masyarakat Indonesia terlebih muncul gejala baru yang diakibatkan virus tersebut. Pandemi ini merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat. Hal ini belum memungkinkan untuk perekonomian masyarakat menjadi stabil seperti sedia kala. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan memutuskan untuk memperpanjang insentif perpajakan untuk membantu memulihkan perekonomian nasional dengan kemudahan pemanfaatan insentif yang lebih luas. Pengaturan terkait insentif pajak ini termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Perpanjangan insentif pajak ini dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak hingga batas waktu yaitu tanggal 31 Juni 2021. Dalam peraturan tersebut, terdapat enam pokok ketentuan insentif pajak yang diperpanjang. Enam insentif pajak yang dimaksud adalah insentif Pajak Penghasilan Pasal 21, insentif Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi, insentif Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor, insentif Pajak Penghasilan Pasal 25, insentif Pajak UMKM, dan insentif PPN. (www.Djp.go.id).

Melansir dari berita finance.detik.com Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan PPh merupakan untuk karyawan. PPh pasal 21 masih kontraksi hingga 6%, karena serapan tenaga kerja. Kita sebut pemulihan ekonomi nasional yang belum semua normal, menyebabkan jumlah tenaga kerja turun atau pengangguran naik. Alasan dari insentif ini sendiri adalah untuk merangsang konsumsi swasta agar ekonomi nasional tidak berkontraksi cukup parah. Pembebasan PPh 21 karyawan ini diharapkan bisa membuat daya beli para pekerja tetap stabil sehingga penjualan retail tidak turun drastis selama pandemi Covid-19. Inti dari insentif ini adalah biaya yang tadinya menjadi kewajiban pekerja, kini ditanggung oleh pemerintah. Intinya, insentif ini bertujuan untuk meringankan beban para pekerja karena memang roda perekonomian di tengah pandemi yang menurun drastis dan penuh dengan ketidakpastian.

Demi percepatan pemulihan ekonomi nasional, sehingga perlu dilakukan perluasan untuk menjangkau sektor yang akan diberikan insentif. Dengan diberlakukannya konsep Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), ekonomi masyarakat diharapkan mulai bergerak naik, sehingga perlu dilakukan perpanjangan jangka



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu agar dampak insentif lebih terasa bagi Wajib Pajak. Demi menjangkau lebih banyak Wajib Pajak dalam memanfaatkan insentif, perlu dilakukan beberapa penyederhanaan dalam tata cara pemanfaatan insentif.

Sebelum masa pandemi virus Covid-19 pemerintah juga pernah melakukan insentif pajak pada tahun 2009, 2016 dan 2018 yang lalu. Tujuan pemerintah melakukan insentif pajak setiap tahun berbeda-beda. Berikut adalah insentif pajak yang di tanggung pemerintah pada tahun 2009, 2016, 2018 yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Insentif Pajak tahun 2009, 2016, 2018

No	Tahun	Bentuk Insentif Pajak	Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
1.	2009	Pajak penghasilan pasal 21 pekerja pada kategori usaha tertentu dalam rangka mengurangi dampak krisis global yang berakibat penurunan kegiatan perekonomian sosial	PMK.03/2009
2.	2016	Insentif Pajak penghasilan atas penghasilan penghapusan piutang negara yang diterima perusahaan daerah air minum.dalam rangka upaya perbaikan kondisi keuangan perusahaan daerah air minum tertentu	PMK.010/2016
3.	2018	Insentif pajak Penghasilan atas bunga atau imbalan surat berharga negara .dalam rangka meningkatkan daya saing surat berharga Indonesia	Nomor 46/PMK.010/2018

Sumber :DJP online (2009,2016,2018)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tahun 2009 pemerintah memberikan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam rangka mengurangi dampak krisis global yang berakibat penurunan kegiatan perekonomian sosial yang di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkuat dengan adanya PMK.03/2009, pada tahun 2016 pemerintah memberikan insentif Pajak Penghasilan atas penghapusan piutang negara yang diterima perusahaan daerah air minum dalam rangka upaya perbaikan kondisi keuangan perusahaan daerah air minum tertentu yang di perkuat dengan adanya PMK.010/2016, di tahun 2018 pemerintah memberikan Insentif Pajak penghasilan atas bunga atau imbalan surat berharga dalam rangka meningkatkan daya saing surat berharga Indonesia yang di perkuat dengan adanya Nomor 44/PMK.010/2018. Melihat dari penjelasan di atas pemberian insentif pajak yang ditanggung pemerintah setiap tahun peraturan berbeda – beda, syarat dan tata caranya juga berbeda-beda. Pemahaman akan peraturan perpajakan yang ditanggung pemerintah menjadi sangat penting bagi para Wajib Pajak agar bisa menghitung kewajiban Pajak yang tepat. Penulis ingin mencoba meneliti mekanisme perhitungan dan penetapan insentif pajak penghasilan pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah (DPT) selama masa pandemi Covid – 19 .

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis bermaksud untuk menyusun tugas akhir yang berjudul: **“MEKANISME PELAKSANAAN PERHITUNGAN DAN PENETAPAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 KARYAWAN TETAP DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA PD. BPR ROKAN HULU ”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian ini:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana mekanisme perhitungan dan penetapan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap di masa pandemi covid-19 pada PD.BPR Rokan Hulu ?
2. Bagaimana kendala dalam perhitungan dan penetapan Insentif Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan tetap di masa pndemi covid-19 yang pada PD.BPR Rokan Hulu?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala dalam perhitungan dan penetapan Insentif pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap dimasa pandemic covid-19 pada PD.BPR Rokan Hulu ?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme perhitungan dan penetapan Insentif pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap di masa pandemic covid-19 pada PD. BPR Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui kendala dalam perhitungan dan penetapan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap yang dapat di masa pandemic covid-19 pada PD.BPR Rokan Hulu
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala dalam perhitungan dan penetapan insentif pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap dimasa pandemic covid-19 pda PD.BPR Rokan Hulu.



1.4. Menfaat Penulisan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan mwnfaat kepada beberapa pihak, antara lain :

1. Menfaat bagi penulis

Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat dalam mencapai kelulusan pada prodi D3 Administrasi perpajakan UIN SUSKA Riau, selain itu juga untuk meningkatkan pemahaman mengenai perpajakan dsan untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai perpajakan dan untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai perpajakan serta mampu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh diperkuliah pada dunia kerja

2. Menfaat bagi mahasiswa

sebagai Langkah awal dalam mengaplikasikan semua ilmu yang telah diperoleh selama duduk di bangku kuliah dan menambah pengetahuan mengenai mekanisme perhitungan dan penetapan PPh pasal 21 atas karyawan tetap , dan hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan di Indonesia sebagai sumber referensi bagi penulis lainnya pada masa yang akan datang

3. Menfaat Bagi Akademisi

hasil penelitian ini di harapkan berguna sebgai sumber informasi dan salah satu sumber referensi kajian teori bagi peneliti yang berminat pada bidang atau topik permasalahan yang sama.

4. Menfaat bagi perusahaan

PD.BPR Rokan Hulu dengan menyusun tugas akhir ini diharapkan tambahna pengetahuan tentang perhitungan dan penetapan Pajak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penghasilan pasal 21 terbaru.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan akan dilakukan di Kantor PD.BPR Rokan Hulu Pasir Pengaraian Rokan Hulu di JL. Tuanku Tambusai Komplek Pasar Modern.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan tanggal 26 Febuari 2021 – 26 Mei 2021

1.5.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam meneliti adalah :

1.5.3.1 Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui wawancara.

1.5.3.2 Data Sekunder

Data Sekunder data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti bentuk laporan, catatan , dan dokumen melalui PD.BPR Rokan Hulu.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data dengan Teknik Observasi dan dokumentasi

1.5.4.1 Observasi

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dengan cara mengamati secara langsung objek yang menjadi tujuan penulis yaitu mekanisme perhitungan dan penetapan insentif Pajak Penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap selama masa pandemic Covid-19 pada PD.BPR Rokan Hulu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1.5.4.2 Interview / wawancara

Penulis mengumpulkan data dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab tentang masalah yang diteliti secara langsung dan terbuka kepada pegawai dan staff PD.BPR Rokan Hulu.

1.5.4.3 Studi Dokumentasi

Pengambilan data yang diperoleh pada tempat yang berkaitan dengan penelitian.

1.5.5 Analisis Data

Setelah data tersusun sistematis, Langkah selanjutnya yaitu mengadakan analisis. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penjelasan dengan kata-kata yang sistematis sehingga permasalahan terungkap dengan jelas dan data yang dinyatakan tidak dalam bentuk statistik.

1.6 Sistematika Penelitian

Dalam penulisan ini terdapat beberapa bab dengan uraian berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, teknik pengumpulan data dan sistematika penulisan .

BAB II : GAMBARAN UMUM PD.BPR ROKAN HULU

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum PD.BPR Rokan Hulu. Tentang sejarah singkat, visi misi, serta struktur organisasi unit kerja dan uraian tugas pokok dan fungsinya dalam PD.BPR Rokan Hulu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan praktek atau konsepsi yang digunakan untuk pembahasan serta deskripsi mengenai data dan fakta berkaitan dengan judul dan pokok pembahasan dan di dalam bab ini akan membahas mengenai mekanisme perhitungan dan penetapan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap pada PD.BPR Rokan Hulu

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir penulisan ini, yang mana dalam bab ini akan memuat kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penulisan pada bab-bab sebelumnya mengenai hal-hal yang telah di keumakan dari beberapa saran yang menjadi bahan masukan dalam mekanisme perhitungan dan penetapan insentif Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan tetap pada PD.BPR Rokan Hulu

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Umum PD. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) ROKAN HULU

2.1.1. Deskripsi Umum Ruang Lingkup Perusahaan

Untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Rokan Hulu dan juga sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan sebuah lembaga keuangan yang menjadi milik masyarakat dan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah Rokan Hulu berniat mendirikan Lembaga Keuangan atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Proses Pendirian

1. Pada tahun 2004 persiapan-persiapan pendirian telah dimulai
2. Pada tahun 2005 proses pendirian untuk mendapatkan izin prinsip sempat tertunda karena berbagai faktor teknis dan nonteknis
3. Pada tahun 2006 berkat keinginan dan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dengan segenap instansi terkait, proses pendirian BPR Rokan Hulu kembali dapat diteruskan, sehingga pada tanggal 7 Juli 2006 melalui surat keputusan Bank Indonesia Nomor: 8/348/DPBPR permohonan izin prinsip pendirian BPR Rokan Hulu sudah dapat disetujui
4. Direksi beserta pemilik dalam batas 360 hari diminta harus dapat melengkapi persyaratan-persyaratan dalam rangka pengajuan izin

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha. Diantaranya: pengesahan PERDA, penyediaan gedung kantor, menyusun 13 Struktur Organisasi dan tata kerjaserta tenaga kerja dan dokumen administrasi lainnya

5. Berkat kerjasama dan koordinasi yang baik antara seluruh seluruh pihak terkait, PEMDA, DPRD, dan pengelola BPR maka semua persyaratan tersebut yang berkaitan dengan pengajuan izin usaha telah dipenuhi, pada tanggal 25 Juli 2007 sesuai Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor: 9/33/KEP.GBI/DPG/2007 memutuskan pemberian izin usaha BPR Rokan Hulu.

Dasar Pendirian

1. Peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu No. 03 Tahun 2007
2. Surat keputusan Bank Indonesia dengan No. 8/348/DPBPR tanggal 10 Juli 2006 tentang persetujuan prinsip pendirian PD.BPR ROKAN HULU
3. Surat keputusan gubernur Bank Indonesia No. 9/33/KEP.GBI/DPG/2007 tentang pemberian izin usaha PD.BPR ROKAN HULU.

2.2. Visi & Misi PD.BPR ROKAN HULU**Visi**

Menjadikan Lembaga keuangan yang mandiri dan menjadi kebanggaan pemerintah kabupaten Rokan Hulu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misi

1. Menjadi ujung tombak pemerintah dalam percepatan akses perbankan bagi masyarakat di wilayah kabupaten rokan hulu.
2. Memberikan pelayanan jasa keuangan dengan menyediakan produk jasa yang baik, dengan harga yang wajar, kejujuran yang penuh integritas, beretika disegala aspek bisnis.
3. Mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki karakter kuat dan kompetensi handal yang dapat memberikan solusi tuntas untuk kepentingan perusahaan dan kepuasan nasabah.
4. Meningkatkan tata kelola Perusahaan serta membangun Budaya Organisasi yang di dasari oleh Nilai-Nilai Inti Perusahaan.
5. Meningkatkan kontribusi PAD dan pengembangan UMKM untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah.

2.3. Struktur Organisasi PD.Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Rokan Hulu

Struktur oerorganisasi di perlukan untuk membedakan batas-batas wewenang dan tanggung jawab secara sistematis yang menunjukkan adanya hubungan / keterkaitann antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Demi tercapainya tujuan umum suatu instansi diperlukan suatu wadah untuk mengatur seluruh aktivitas maupun kegiatan instansi tersebut. Pengaturan ini dihubungkan dengan pencapaian tujuan instansi yang telah ditetapkan sebelumnya. Wadah tersebut disusun dalam suatu struktur organisasi dalam instansi.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

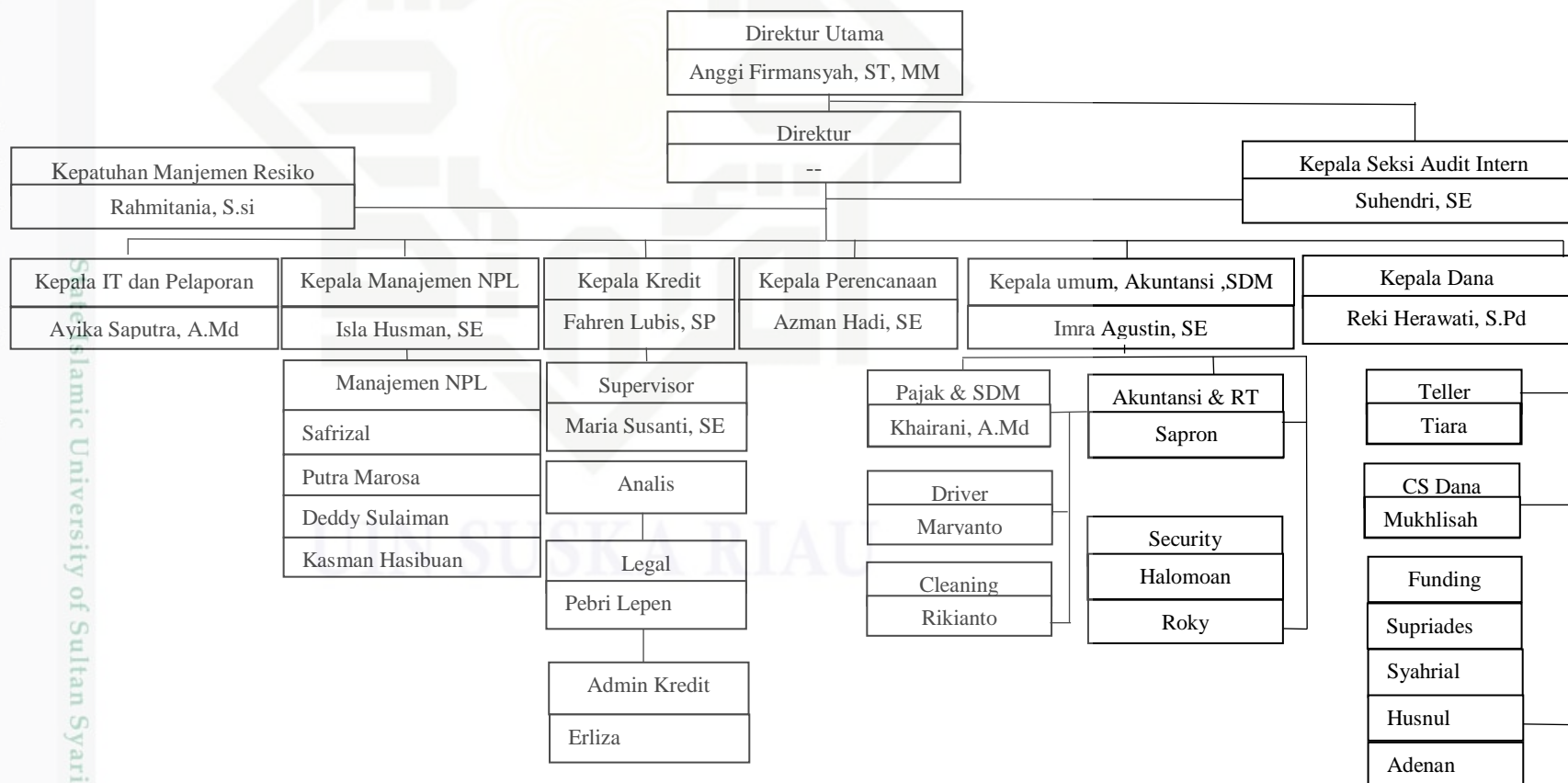
Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan pekerjaan dapat diterapkan, sehingga efisiensi dan efektifitas kerja dapat diwujudkan melalui kerja sama dan koordinasi yang baik sehingga tujuan instansi tersebut dapat dicapai. Suatu instansi terdiri dari berbagai unit kerja yang dapat dilaksanakan perseorangan, maupun kelompok kerja yang berfungsi untuk melaksanakan serangkaian kegiatan tertentu dan mencakup tata hunungan secara vertical, maupun saluran tunggal



Gambar : II.1 Struktur Organisasi PD. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Rokan Hulu



Sumber : Data PD.BPR Rokan Hulu Tahun 2021



2.4 Uraian Tugas PD. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Rokan Hulu

Adapun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. Badan Pengawas.

Tugas Badan Pengawas adalah sebagai berikut :

- a. Menciptakan kebijaksanaan umum, menjalankan pengawasan dan pengendalian direksi mengenai tanggung jawab dirut dan direktur PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu.
- b. tugas memutuskan dan mengesahkan rencana kerja dan anggaran tahunan bank.

Fungsi Badan Pengawas adalah sebagai berikut :

- a. Membantu mendorong pembinaan serta pengembangan PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu.
- b. Memberikan pertimbangan dan saran yang diminta atau tidak diminta kepada Pemkab Rokan Hulu untuk perbaikan atau pengembangan PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu.
- c. Meminta keterangan kepada direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan PD. Bank Perkreditan rakyat rokan Hulu.

Badan pengawas bertanggung jawab kepada Pemkab Rokan Hulu selaku Pemegang saham.



2. Direksi

Direksi memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menjalankan dan pengurusan pengelolaan Bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Membuat dan menyampaikan laporan kerja bank kepada badan pengawas.
- c. Memberikan keterangan yang diminta oleh badan pengawas dan membentuk satuan khusus yang menangani tugas-tugas tertentu.

Fungsi Direksi adalah sebagai berikut :

- a. Memimpin BPR berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan badan pengawas.
- b. Menetapkan kebijaksanaan, mengangkat dan memberhentikan pegawai BPR berdasarkan peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan Pemkab Rohul selaku pemegang saham setelah mendengar pertimbangan badan pengawas,.
- c. Menetapkan susunan organisasi dan tata cara kerja, dengan persetujuan Pemkab Rohul setelah mendengar pertimbangan badan pengawas.
- d. Mewakili BPR diluar maupun didalam pengadilan.
- e. Membuka kantor cabang atau unit pelayanan kas berdasarkan persetujuan Pemkab Rohul selaku pemegang saham.

Direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham melalui badan pengawas.

Direksi terdiri dari :

- a. Direktur Utama
- b. Direktur



3. Seksi Pengawasan/SPI

Tugas dari Seksi Pengawas/SPI adalah sebagai berikut :

- a. Meneliti dan menemukan kesalahan-kesalahan dari setiap bagian seksi.
- b. Melakukan pengawasan terhadap kinerja seluruh karyawan.

4. Seksi Akuntansi dan Pelaksana akuntansi

Adapun tugas dari kasi seksi akuntansi yaitu :

- a. Menginput data laporan mingguan, bulanan, tahunan.
- b. Melaporkan data-data yang di input ke Bank Indonesia.

Tugas dari pelaksana akuntansi yaitu :

- a. Mengecek semua voucher penarikan, setoran maupun pinbuk.

5. Seksi kredit, Analis, Adm.Kredit, Cs.Kredit dan Penagihan.

Tugas Seksi Kredit yaitu menerima laporan dari pelaksana, adm.kredit, analis maupun penagihan.

Tugas Analis yaitu mencari informasi data nasabah layak atau tidak layaknya nasabah diberi pinjaman.

Tugas Adm.Kredit yaitu :

- a. Membuat akad kredit.
- b. Membuat notaris.
- c. Membuat asuransi.
- d. Tugas Cs.Kredit yaitu menerima atau melayani nasabah yang mengajukan pinjaman (pelayanan).

Tugas Penagihan yaitu meninjau seluruh nasabah yang kredit dalam keadaan macet atau diragukan.



6. Seksi Perencanaan dan TSI

Tugas Seksi Perencanaan yaitu :

- a. Merencanakan sesuatu yang akan diajukan seperti pembuatan kalender.
- b. Merancang semua kegiatan yang akan dilaksanakan untuk keperluan kantor.

Tugas TSI yaitu :

- a. Melakukan pemasangan computer di kantor.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap komputer dan jaringan yang bermasalah pada kantor.
- c. Melakukan perbaikan apabila ada komputer atau jaringan yang bermasalah pada kantor

7. Seksi Dana, Cs.Dana dan Teller

Tugas Seksi Dana yaitu :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat.
- b. Memperkenalkan produk-produk PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu kepada masyarakat.

Tugas Cs.Dana yaitu :

- a. Melayani pembukaan rekening tabungan.
- b. Melayani informasi dari nasabah yang merasakan dirugikan.

Tugas Teller yaitu :

- a. Mengatur dan mengendalikan kas harian.
- b. Melayani semua jenis setoran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mengelola dan menatausahakan kas.
- d. Melakukan pemostingan dan penutupan kas pada akhir hari.
- e. Mengambil langkah-langkah dan keputusan untuk kasus-kasus bila terjadi perbedaan tandatangan nasabah dengan kartu contoh tandatangan atau data lain yang menyangkut nasabah.
- f. Bertanggung jawab atas nominal uang sesuai dengan volume transaksi atau laporan harian.

8. Seksi Umum dan Rumah Tangga dan Personalia

Tugas Seksi Umum yaitu :

- a. Menerima laporan-laporan dari setiap seksi kemudian diajukan kepada Direksi atau Direktur.
- b. Membuat surat perintah tugas dan mengajukan ke pihak yang akan melakukan pelatihan atau kegiatan.

Tugas Rumah Tangga dan Personalia yaitu:

- a. mengurus semua rumah tangga termasuk peralatan yang dibutuhkan sehari-hari baik itu air minum maupun pelayanan kantor lainnya.
- b. Merekap absen karyawan (sumber daya manusia)
- c. Menghitung dan membuat gaji dewan pengawas , direksi dan karyawan
- d. Menghitung pajak , membayar dan melaporkan
- e. Mengontrol kedisiplinan karyawan
- f. Menyiapkan administrasi cuti karyawan



2.5 Sumber Daya Manusia PD.Bank Pengkreditan Rakyat Rokan Hulu

Sumber daya Manusia PD.BPR Rokan Hulu berjumlah 30 orang

Tabel 2.1 Daftar Karyawan PD.BPR Rokan Hulu

No	Unit Kerja	Jumlah Karyawan
1.	Direktur Utama (1 Pria)	1
2.	Seksi Audit Intern (1 Pria)	1
3.	Seksi Kepatuhan, Manajemen Resiko/pejabat Eksekutif APU (1 Wanita)	1
4.	Seksi IT & Pelaporan (1 Pria)	1
5.	Seksi Manajemen NPL (5 Pria)	5
6.	Seksi Kredit (7 Pria + 2 Wanita)	9
7.	Seksi Perencanaan (1 Pria)	1
8.	Seksi Umum, Akuntansi dan SDM (5 pria + 2 Wanita)	7
9.	Seksi Dana (5 Pria + 2 Wanita)	7

Sumber :Data PD.BPR Rokan Hulu Tahun 2021

Tabel 2.2 Jumlah Karyawan Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah Karyawan	%
1.	S1	10	30%
2.	D3	2	6%
3.	SLTA	20	61%
4.	SLTP	1	3%
Jumlah		33	100%

Sumber : PD.BPR Rokan Hulu Tahun 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Mekanisme Pelaksanaan dan Penetapan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan Tetap di PD.BPR Rokan Hulu maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan :

1. Mekanisme penetapan dan perhitungan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) atas Karyawan tetap telah terlaksana sesuai peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 sudah berjalan dengan baik.
2. Alasan pemerintah memberikan Insentif pajak bagi wajib pajak terdampak pandemic Covid-19 adalah untuk menjaga stabilitas perekonomian negara. Karena Covid-19 yang mewabah di Indonesia mengacaukan kondisi perekonomian negara dan perekonomian wajib pajak. Insentif pajak telah di definisikan dalam beberapa peraturan. Insentif pemungutan pajak adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pajak
3. Adapun kendala / hambatan yang di temui dalam mekanisme perhitungan dan penetapan insentif pajak penghasilan pasal 21 sebagian besar karena terkendala karena adanya masalah koneksi internet yang kurang memadai, kurangnya pemahaman terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah, yang berpotensi dengan adanya masalah dimasa yang akan datang, Kurangnya sosialisasi dari Direktorat jendral



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak mengenai Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21, sehingga kesulitan memahami tentang Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ini

4. Upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala dalam perhitungan dan penetapan insentif pajak penghasilan pasal 21 yaitu, Meningkatkan kapasitas server jaringan internet menjadi lebih tinggi ,dengan meningkatkan kapasitas jaringan internet, Mengadakan pelatihan-pelatihan terkait dengan dengan perpajakan , dengan mengadakan pelatihan terkait perpajakan akan menambah pengetahuan tentang perpajakan yang terbaru , Mengikuti program dari Direktorat jendral perpajakan yaitu dengan program bincang pajak di halaman youtube chanelnya pajak riau , dalam bincang pajak itu membahas tentang perpajakan terutama tentang perpajakan yang terbaru termasuk tentang Insentif pajak penghasilan pasal 21

4.2 Saran

Adapun saran-saranyang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil penelitian sebagai berikut :

1. PD.BPR Rokan Hulu agar Meningkatkan pengetahuan tentang peraturan terbaru di bidang perpajakan dan mengadakan pelatihan dan seminar tentang perpajakan sehingga dapat mengetahui dan meningkatkan pengetahuan perpajakan yang terbaru
2. PD.BPR Rokan Hulu sebaiknya lebih memperdalam mengenai Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh pasal 21) sehingga tidak tertinggal dengan peraturan terbaru

3. Selalu meningkatkan koneksi jaringan internet berkecepatan tinggi pada PD.BPR Rokan Hulu sehingga mempermudah dalam melaporkan dan memksimalkan system informasi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran : Q.S. Al-Baqarah ayat : 195

Q.S. An-Nisa ayat : 59

Q.S. At-Taubah ayat :29

Mardiasmo.2018.Perpajakan Edisi Terbaru.Yogyakarta: Andi

Suandy, Erly. 2017. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta : Salemba Empat

Indonesia, 2020, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, Surat Edaran Direktur Jendral Pajak SE-47/PJ/2020.

Fitriandi, primandita, dkk. 2018. Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap.Jakarta: Salemba Empat

Gusfahmi.2007.Pajak Menurut Syariah.Jakarta : Raja Grafindo Persada

Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2013.Jakarta : Mintra Wacana Media

Mardiasmo.2016.Perpajakan edisi Revisi.Yogyakarta : Andi

Rahayau, Kurnia , Siti.2010.Perpajakan .Yogyakarta : Andi

Bagus, Lorens.2005, Kamus Filsafat, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama

Resmi, Siti. 2017. Perpajakan : Teori dan Kasus , edisi 10 Buku 1, Jakarta : Salemba Empat

Siahan, Marihot Palala. 2004. Utang Pajak , pemenuhan kewajiban, dan penagihan pajak dengan surat paksa . Jakarta : Raja Grafindo Persada

Indonesia, 2020, Peraturan Menteri keuangan Tentang Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, PMK No. 110 Tahun 2020

Indonesia, 2021, Peraturan Menteri Keuangan Tentang PerpanjanganInsentif Pajak Bagi Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, PMK No. 9 Tahun 2021

Indonesia, 2020, Undang- Undang Cipta Kerja Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 113No.11 Tahun 2020 Undang-Undang Cipta Kerja .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Indonesia, 2020, Undang-Undang Cipta Kerja Tentang Pajak Penghasilan, Pasal 111 No.11 Tahun 2020 Undang Undang Cipta Kerja

Indonesia, 2009, Peraturan Menteri Keuangan Tentang Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Terdampak Krisis Global, PMK No.03 Tahun 2009

Indonesia, 2016, Peraturan Menteri Keuangan Tentang Insentif Pajak Penghasilan Penghapusan Piutang Negara Yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Upaya Memperbaiki Kondisi Keuangan Perusahaan daerah Air minum, PMK NO.10 Tahun 2016

Indonesia, 2018, Peraturan Menteri Keuangan Tentang Insentif Pajak Penghasilan Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Surat Berharga Indonesia, PMK No.46 Tahun 2018

<http://www.bpkp.go.id/berita/read/22512/0/I> (diakses 1 maret 2021, 09.00)

<https://money.kompas.com/read/2020/05/10/091500226/perekonomian-indonesia-pasca-pandemi-covid-19?page=all> (diakses 5 maret 2021, 09.00)

<http://www.bankbprrohul.co.id/wp-content/uploads/2019/05/Tata-Kelola-PD.-BPR-Rokan-Hulu-Th-2018.pdf> (diakses 5 maret 2021, 09.00)

<https://www.akseleran.co.id/blog/pph-21/#:~:text=Seperti%20jenis%20pajak%20lain%20pada,menghambat%20laju%20inflasi%20di%20Indonesia.> (diakses 5 maret 2021. 09.30)

https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search (diakses 6 maret 2021 10.00)

<https://www.pajak.go.id/id/artikel/insentif-pajak-diperpanjang-manfaatkan-segera> (diakses 6 maret 2021 , 10.30)

<https://pajak.go.id/id/pajak-penghasilan-ditanggung-pemerintah-atas-penghasilan-dari-penghapusan-piutang-negara-yang-0> (diakses 3 april 2021 , 09.00)

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5407487/serapan-tenaga-kerja-masih-seret-setoran-pajak-penghasilan-membre?_ga=2.131446287.1454063962.1618536265-306843188.1618536265 (diakses 4 april 2021 , 09.00)

<https://news.ddtc.co.id/penanggulangan-pph-pasal-21-selama-pandemi-covid-19-22147> (diakses 4 april 2021, 09.30)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5facf01d6ff5f/ragam-kebijakan-insentif-dan-relaksasi-pajak-selama-pandemi/> (diakses 5 april 2021, 09.40)

<https://glints.com/id/lowongan/pph-21-covid-19/#.YIIQJ2czbIU> (diakse 20 april 2021 , 08.00)

<https://pengertiandefinisi.com/kumpulan-pengertian-mekanisme/> (diakses 5 april 2021,08.30)

<https://news.ddtc.co.id/uu-cipta-kerja-terbit-download-perubahan-3-uu-pajak-di-sini-25218> (diakses 7 april 2021, 10.00)

<https://klikpajak.id/blog/perhitungan/contoh-penghitungan-pph-21-dtp-yang-bekerja-januari-desember-2020/> (diakses 10 april 2021, 09.00)

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/658907/banyak-kendala-aturan-relaksasi-pajak-pph-21-disederhanakan> (diakses 10 april 2021, 09.30)

UIN SUSKA RIAU

Lampiran

Berikut adalah sosialisasi tentang Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh dirjen pajak :



The image is a screenshot of a social media post from the official account of Pajak Riau (@pajakriau). The post is titled "BIJAK (BINCANG PAJAK)" and features a yellow background with a large, stylized "P" logo. The main text reads "PMK-9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak". Below this, it states "Bersama narasumber dari: Tim Penyuluh Pajak Kanwil DJP Riau". A circular logo on the right shows a cartoon bee character holding a document labeled "SPT". A red "ON AIR" button is visible. The post lists two dates: Wednesday, June 9, 2021, from 16:00 to 17:00 WIB on Smart 101.8 FM Pekanbaru, and Thursday, June 10, 2021, from 14:00 to 15:00 WIB on Bharabas 97.5 FM Pekanbaru. It also provides links for YouTube Live, Facebook Live, and the website Bharabas975fm.com. At the bottom, there are logos for eReg, eBilling, and eFiling, along with the website www.pajak.go.id.

Gambar 3.4 Pemberitahuan BIJAK (Bincang Pajak)
Sumber : Sosial Media Pajak Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3.5 Pelaksanaan Bincang Pajak tentang PMK-9/PMK.03/2021 Tentang Insentif pajak

Sumber : Media Social Kantor Wilayah DJP Riau

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apa yang dimaksud dengan insentif pajak ?
2. Bagaimana mekanisme perhitungan dan penetapan pph pasal 21 karyawan tetap pada PD.BPR Rokan Hulu?
3. Bagaimana mekanisme pemberian insentif PPh 21 atas karyawan tetap PD.BPR Rokan Hulu?
4. Apakah mekanisme perhitungan dan penetapan pph 21 di PD.BPR Rokan Hulu sudah sesuai dengan perundang-undangan perpajakan ?
5. Apakah ada perbedaan mekanisme perhitungan dan penetapan pph 21 atas karyawan tetap pada PD.BPR rokan hulu sebelum dan sesudah pandemic covid – 19 ?



Pasir Pengaraian, 29 Maret 2021

Nomor : 090/UM-BPR/PST/III/2021
Perihal : Balasan Izin Penelitian

Kepada Yth. :
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN
ILMU SOSIAL
UIN SUSKA RIAU
Di
Pekanbaru

Dengan hormat,

Berdasarkan surat saudara tertanggal 26 Februari 2021 dengan nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1534/2021 tentang Izin Penelitian Penulisan Skripsi, maka dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya PD. BPR Rokan Hulu yang beralamat di Jl. Tuanku Tambusai Komplek Pasar Modern Pasir Pengaraian mengizinkan Mahasiswa yang bernama FADHIL ADITYA Jurusan D-III Perpajakan untuk Penelitian pada Perusahaan kami.

Demikian surat ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PD. BPR ROKAN HULU
Direksi
PERUSAHAAN DAERAH
BPR ROKAN HULU
KANTOR PUSAT

ANGGI FIRMANSYAH, ST.MM
Direktur Utama



UIN SUSKA RIAU

Ditujukan Undang-Undang

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/1536/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Laporan Penelitian**

Pekanbaru, 26 Februari 2021 M
14 Rajab 1442 H

Kepada
Yth. Sahwitri Triandani, S.E, M.Si.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa:

N a m a : Fadhil Aditya
NIM : 01870613855
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : VI (Enam)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: **"Mekanisme Pelaksanaan Perhitungan dan Penetapan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Dimasa Pandemi Covid-19 Pada PD. BPR Rokan Hulu"**. Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga



Prof. Dr. Nj. Leny Nofianti. MS, SE, M.Si, Ak, CA
NIP. 19751112 199903 2 001



UIN SUSKA RIAU

Dilindungi Undang-Undang

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1534/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Pekanbaru, 26 Februari 2021 M
14 Rajab 1442 H

Kepada
Yth. Pimpinan
PD. BPR Rokan Hulu
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

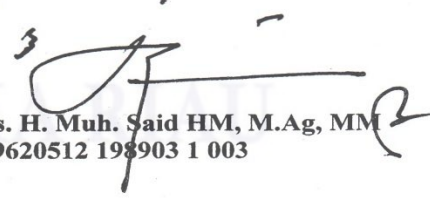
Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : FADHIL ADITYA
NIM. : 01870613855
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : VI (Enam)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: **"Mekanisme Pelaksanaan Perhitungan dan Penetapan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Dimasa Pandemi Covid-19 Pada PD. BPR Rokan Hulu "**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,


Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Fadhil Aditya lahir di Rokan Hulu, Kota Tengah 05 Juli 2000 yang merupakan anak kedua dari dua bersaudara yang dilahirkan pasangan Bapak Sriyanto, S.sos dan Ibu Sudarmi dan mempunyai Saudari yang Bernama Maya Ayuningtyas, S.Pd. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis bermula dari Tk Dharmawanita (2005-2006), SD Negeri 008 Rambah Rokan Hulu (2006-2012), SMP Negeri 1 Rambah Rokan Hulu (2012-2015), SMK Negeri 1 Pasir Pengarian Rokan Hulu (2015-2018). Selanjutnya melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial mengambil jurusan D3 Administrasi Perpajakan. Penulis melaksanakan Praktek kerja Lapangan (PKL) di CV.Riau Berkarya Kreatif (Juli- Agustus 2020). Dan melakukan penelitian di PD.BPR Rokan Hulu (Februari – Juli 2021) untuk menyelesaikan Pendidikan di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau maka penulis mengajukan judul Tugas akhir dengan Judul yaitu “**Mekanisme Pelaksanaan Perhitungan dan Penetapan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Di Masa Pandemi Covid-19 Pada PD.BPR Rokan Hulu**”.

Pengalaman organisasi yang penulis lakukan selama duduk di bangku perkuliahan selama 3 tahun bermula dari Himpunan Mahasiswa Jurusan D3 Administrasi Perpajakan selama 3 tahun ini, dan bergabung ke dalam organisasi Pramuka Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Dan bergabung ke dalam anggota Sanggar Latah Tuah Universitas Sultan Syarif Kasim Riau . Banyak yang berkesan dalam mengikuti dan bergabung di Setiap Organisasi dan banyak kegiatan- kegiatan yang menarik, Dapat menambah ilmu dan relasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.